

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 19 Januari 2011

Subyek : Sungai

Hal : 23

LINGKUNGAN Seabrek Masalah Berderet di Hulu Citarum



Sebidang tanah yang masuk wilayah PTPN VIII dimanfaatkan warga sekitar untuk bertanam sayuran, di Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Keterbatasan lahan adalah masalah laten yang mengancam Kertasari, sebuah daerah di hulu Sungai Citarum. Penyebabnya, wilayah yang bisa digunakan warga terjepit areal milik Perhutani maupun PTPN VIII.

Sungai Citarum yang berkelok sepanjang 308 kilometer membelah Jawa Barat dan bermuara ke Laut Jawa di Muara Gembong, Bekasi, sudah kronis akibat pencemaran limbah industri maupun domestik hingga kebijakan tata wilayah yang tidak mendukung. Sebagai penghasil air baku untuk Jakarta, Ibu Kota Indonesia, seabrek masalah berderet di hulu Citarum. Abdurrahman (54), warga Desa Tarumajaya, Selasa (11/1), mengabaikan angin yang berderu kencang hingga memekakkan telinga, di lereng Gunung Wayang. Meski pepohonan di lereng perbukitan berayun disapu angin, dia tetap mengolah tanah seluas 200 meter untuk bertanam wortel.

Lahan yang diolah Abdurrahman berdampingan dengan hamparan pohon teh yang menghijau. Lokasinya, di wilayah Perkebunan Kertamanah milik PT Perkebunan Nusantara VIII. "Saya tidak mencuri tanah milik siapa pun. Saya siap mempertahankannya agar keluarga saya bisa makan," katanya dengan nada datar dan sorot mata tajam. Abdurrahman beralasan, lahan garapan di desa tersebut jauh dari memadai.

Desa Tarumajaya maupun desa lainnya di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, berada di antara wilayah Perhutani dan PTPN VIII. Dari wilayah kecamatan seluas 15.000 hektar, hanya 4.500 hektar yang bisa dimanfaatkan untuk permukiman berikut fasilitas umum, serta lahan milik perseorangan. Sebagian lahan Perhutani dimanfaatkan untuk menanam kopi.

Dengan memanfaatkan lahan seluas 200 meter untuk ditanami wortel, Abdurrahman memperkirakan, hanya mendapat Rp 500.000 per empat bulan, belum termasuk biaya produksi, upah buruh, dan pupuk. Selama ini, dia menggantungkan hidup pada kebun alpukatnya, yang panen dua kali setahun.

Tak hanya Abdurrahman yang "bermasalah" dengan PTPN VIII, Enjang Sumpena (30) pun demikian. Hari itu, ia sibuk membangun rumah barunya berukuran 25 meter persegi. Rencananya, rumah itu akan ditempati bersama istri dan dua anaknya. Ia mengaku sengaja membangun di sana karena sudah tidak ada lagi lahan tersisa.

Permukiman penduduk yang tersebar di beberapa titik kebanyakan berupa rumah yang berdesakan dengan tetangganya, bahkan ada pula rumah berukuran kurang dari 21 meter persegi di bantaran sungai. "Mustahil membeli tanah untuk membangun rumah dengan mengandalkan pendapatan buruh serabutan sebesar Rp 15.000 per hari," kata Enjang.

Camat Kertasari, Asep Ruswandi, mengakui, tekanan penduduk adalah masalah yang saat ini belum mengemuka, tapi dikhawatirkan bisa meledak di masa mendatang. "Di lahan yang bisa digunakan warga sekitar 4.500 hektar ini, sudah ada 66.000 jiwa dengan sebagian besar mata pencaharian buruh tani dan peternak sapi," ujarnya.

Sekretaris Forum Kertasari Bersatu, Dede Juhari, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memanfaatkan sekitar 1.050 hektar tanah milik perkebunan itu. Bila berhasil, tanah tersebut akan dibagi-bagi kepada warga untuk digarap.

"Keterbatasan lahan adalah penyebab warga bertanam sayuran di gunung hingga puncaknya. Semoga langkah ini bisa membuat mereka turun sehingga daerah penyangga Citarum bisa ditata," kata Dede.

Masalah tak sekadar itu, maraknya pertanian sayur di Kertasari juga melupakan kaidah konservasi. Lahan pertanian menjamur hingga puncak bukit. Bahkan, untuk menanam tomat maupun kubis, penanaman sengaja mengikuti arah kemiringan lereng dengan alasan menghindari sayuran busuk tergenang air.

Implikasinya serius. Begitu hujan turun, tanah pucuk tergerus air dan terbawa hingga ke badan jalan, rumah penduduk, dan akhirnya ke badan sungai. Sedimen tersebut terbawa dan menyebabkan pendangkalan sungai di daerah yang lebih rendah.

Tak menyentuh akar

Abrar Prasodjo, Ketua Tim Survei Wanadri-yang akan memetakan Sungai Citarum-mengatakan, reboisasi hulu Citarum sudah lama dilakukan, tapi selalu kandas hasilnya karena tidak pernah menyentuh akar permasalahannya, yakni kesejahteraan warga.

Lumpur, katanya, bukan satu-satunya bahan yang menyesaki air sungai, tapi juga kotoran sapi. Terdapat setidaknya 5.500 sapi yang ditanamkan di Kertasari dan sebagian besar kotorannya tidak diolah kembali. Langsung dilepaskan ke badan sungai. Setidaknya ada 55 ton kotoran sapi yang harus ditangani setiap harinya.

Terkait masalah yang satu ini, pemerintah sebetulnya sudah mencanangkan program biogas. Tapi, ternyata belum efektif menekan pembuangan limbah ternak. Pendampingan yang kurang efektif menyebabkan usia pengolahan limbah ternak menjadi energi biogas berusia pendek.

Seperti terjadi pada pengolahan limbah ternak milik lim Aminah di Desa Tarumajaya. Dua tahun sejak alat pengolah limbah diterima, biogasnya tidak bisa dimanfaatkan karena plastiknya jebol. "Padahal, dulu dijanjikan bisa bertahan hingga 8 tahun. Terpaksa kotorannya kembali saya buang langsung ke sungai," kata lim.

Dadang Sudardja dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat menuturkan, kotoran sapi yang dibuang langsung ke badan sungai telah mencemari air dengan bakteri *Eschericia coli*. Akibatnya, air tidak bisa digunakan manusia untuk air minum maupun kebutuhan air bersih lainnya.

Pencemaran air sungai yang demikian, lanjut Dadang, juga menurunkan kualitas air. Padahal, di daerah hilir kualitas air semakin merosot akibat limbah pabrik maupun limbah domestik. Itulah ironi Sungai Citarum, Penderitaannya justru dimulai tidak jauh dari hulunya. (Didit Putra Erlangga Rahardjo)